PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EVI FITRIANI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **1000499**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 8.234.085.000

1. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 1.876.155.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.825.075.000
3. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.012.525.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 3.267 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 359.370.000
6. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 611.400.000
7. Tanah Seluas 1.356 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 149.160.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000
9. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 365.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX-5 (4X2) A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**218.095.000**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**747.299.896**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**9.564.479.896**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**9.564.479.896**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.